



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 900/693/BPKAD/2020
Tanggal : 14/09/2020

No. Koreksi : -420

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Kepada Pejabat Daerah

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Ratih

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DHIR 18/09/2011:35



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KENDARAAN DINAS KEPADA PEJABAT NEGARA

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang, yang berada pada Sekretariat Daerah Kota Palu bagi pejabat negara, perlu dilakukan penjualan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 339 ayat (6) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan barang milik daerah dilakukan dalam hal tertentu terhadap barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Kepada Pejabat Negara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
AGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Sh</i>

Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Surat Persetujuan Penjualan Nomor: 900/1604/BPKAD/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Persetujuan Penjualan Milik Daerah (BMD) Tanpa Lelang Kepada Pejabat Negara;
 2. Keputusan Wali Kota Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Nomor 900/681/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS KEPADA PEJABAT NEGARA.
- KESATU : Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Kepada Pejabat Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penjualan Kendaraan Dinas Kepada Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020.

PARAF KOORDINASI	
SAJIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Sh</i>



KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

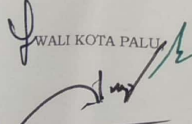
WALI KOTA PALU,


HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS
 KEPADA PEJABAT NEGARA

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	N o m o r					Asal Usul Cara Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Wajar (Rp)	Harga Jual (Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	02.03.01.01.03	Station Wagon	001	Toyota Alphard	2.362 cc	Besi	2012		JTEGDE23H8C8226983	2AZ-H879517	DN 1244 A DN 2 A	J-0025685S1	Pembelian	868.300.000	203.283.000	40.456.600	
2	02.03.01.01.03	Station Wagon	002	Toyota Alphard	2.362 cc	Besi	2012		JTEGDE21H4C8218012	2AZ-H861062	DN 1245 A DN 1 A	J-00256859S1	Pembelian	71.110.000	243.273.000	48.654.600	

WALI KOTA PALU

 HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	